

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi yang dikembangkan dalam suatu negara menjadi gambaran dari proses pembangunan ekonomi yang memberikan dampak peningkatan pendapatan per kapita untuk berada di titik tertinggi kemakmuran (Yoertiara & Feriyanto, 2022). Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, tidak bisa dihindari adanya permasalahan terkait pembangunan, seperti adanya ketimpangan pendapatan. ADB menyatakan dalam (Wibowo, 2016) bahwa ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakadilan, ketidakpuasan, konflik, kriminalitas, korupsi, dan penghambatan pembangunan. Oleh karena itu, mengurangi ketimpangan pendapatan salah satu tujuan pembangunan yang penting .

Menurut World Bank (2015), Indonesia menghadapi empat penyebab ketimpangan pendapatan. Pertama, keluarga miskin mengalami ketimpangan peluang karena tidak mendapatkan kesempatan yang adil dari awal kehidupan. Kedua, ketidakmerataan pekerjaan menciptakan disparitas upah antara pekerja berketerampilan tinggi dan rendah, dengan pekerja tanpa keterampilan cenderung terperangkap dalam pekerjaan informal berproduktivitas rendah. Ketiga, perbedaan konsentrasi kekayaan berkontribusi pada ketimpangan, di mana masyarakat dengan aset lebih banyak dapat memperburuk disparitas ekonomi. Keempat, saat terjadi guncangan ekonomi, dampaknya lebih dirasakan oleh masyarakat miskin, sehingga menurunkan potensi pendapatan mereka. Maka dari itu semakin tinggi tingkat ketimpangan, semakin besar kesenjangan antara Masyarakat berpendapatan tinggi

dan rendah, dan dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian Farhan & Sugianto (2022) mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan faktor utama yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Pulau Jawa. Sementara itu, penelitian Nilasari & Amelia (2022) di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa tingkat PDRB per kapita memainkan peran penting dalam mempengaruhi ketidaksetaraan pendapatan. Selain itu, studi oleh Anshari et al., (2018) menemukan bahwa peningkatan upah minimum secara signifikan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan di Indonesia.

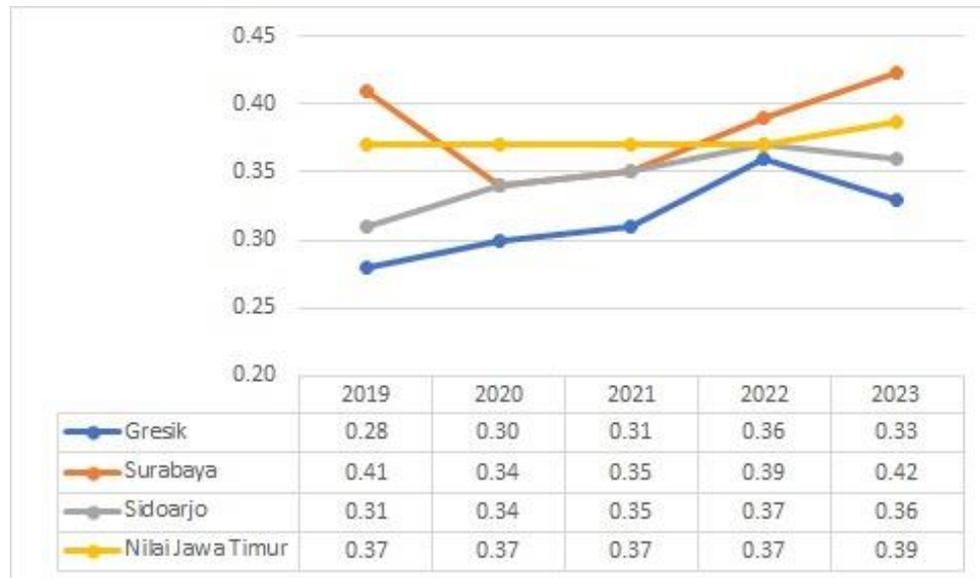
Meskipun telah banyak penelitian yang dibahas oleh para ahli mengenai ketimpangan pendapatan, tentu saja terdapat banyak kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, salah satunya penggunaan metode analisis regresi data panel. Kemudian variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tingkat kemiskinan, dan upah minimum yang digunakan sebagai variabel pada penelitian sebelumnya. Namun, sisi perbedaan penelitian ini akan ditekankan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama dari penelitian sebelumnya menggunakan periode waktu sekitar enam tahun, terutama antara tahun 2016 dan 2021, yang belum mencerminkan perkembangan terkini pada tahun 2022 dan 2023. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan rentang waktu tahun 2013-2023 dengan durasi 11 tahun. Perbedaan kedua terkait dengan lokasi penelitian, di mana lokasi yang dipilih oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu di Surabaya Raya.

Pada penelitian ini menggunakan lokasi di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo yang biasa disebut Surabaya Raya. Istilah Surabaya Raya ini digunakan oleh pemerintah, yang Dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Surabaya menyebutkan bahwa adanya kolaborasi pembangunan di Surabaya Raya (Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo). Pemilihan lokasi ini karena ketiga kawasan tersebut merupakan wilayah yang berdekatan dan memiliki karakteristik yang berbeda. Ibu kota Jawa Timur, yakni Surabaya, menjadi salah satu bagian dari daftar kota terbesar di Indonesia dan menduduki posisi kedua dalam hal ukuran dan dikenal dengan tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi. Sidoarjo merupakan kabupaten yang berada di sebelah selatan Surabaya. Terkenal sebagai pusat industri kecil dan menengah, khususnya di bidang perkayuan, kerajinan, serta makanan. Kabupaten Gresik, yang terletak di sisi barat Surabaya, memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya alamnya, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Tiga wilayah ini menunjukkan disparitas pendapatan yang beragam, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang akan diteliti.

Data BPS memberikan bukti mengenai hal ini, bahwa Surabaya memiliki rasio gini tertinggi di antara semua kabupaten/kota, mencapai 0,42 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa Surabaya memiliki perbedaan yang paling besar antara pendapatan kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Kemudian, Gresik memiliki rasio gini terendah di antara 3 kabupaten/kota, mencapai 0,33 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa Gresik memiliki perbedaan yang paling kecil antara pendapatan kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Lalu ada Kabupaten Sidoarjo memiliki rasio gini yang paling stabil di antara semua kabupaten/kota, hanya berubah sedikit di setiap tahunnya dari 0,31 pada tahun 2019, angkanya berubah menjadi 0,34 pada tahun 2020 dan pada setiap tahunnya terus bertambah namun di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,36. Ini menunjukkan bahwa

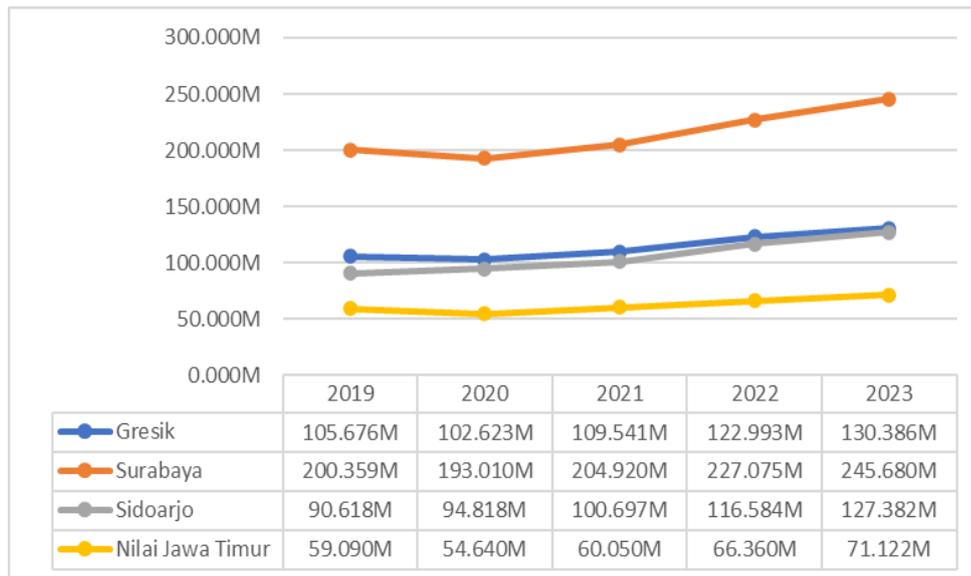
Kabupaten Sidoarjo memiliki distribusi pendapatan yang paling merata di antara semua kabupaten/kota.



Gambar 1.1. Ketimpangan Pendapatan dengan ukuran Rasio Gini Surabaya Raya Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019-2023

Dari Gambar 1.1. bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah Surabaya Raya menunjukkan peningkatan sepanjang waktu, menandakan peningkatan tiap tahun dalam rentang waktu tersebut. Lalu ada PDRB perkapita yang akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan.. Berdasarkan klarifikasi Afini Nur (2019), ketika pendapatan per kapita naik, ini akan secara otomatis mendorong peningkatan dalam daya beli atau konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi atau daya beli masyarakat akan mendorong kenaikan produksi barang dan jasa. Sebaliknya, jika PDRB per kapita rendah, daya beli atau konsumsi masyarakat akan menurun, yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa. Karena itu, diberikan data PDRB per kapita Surabaya Raya dari tahun 2019 sampai 2023.



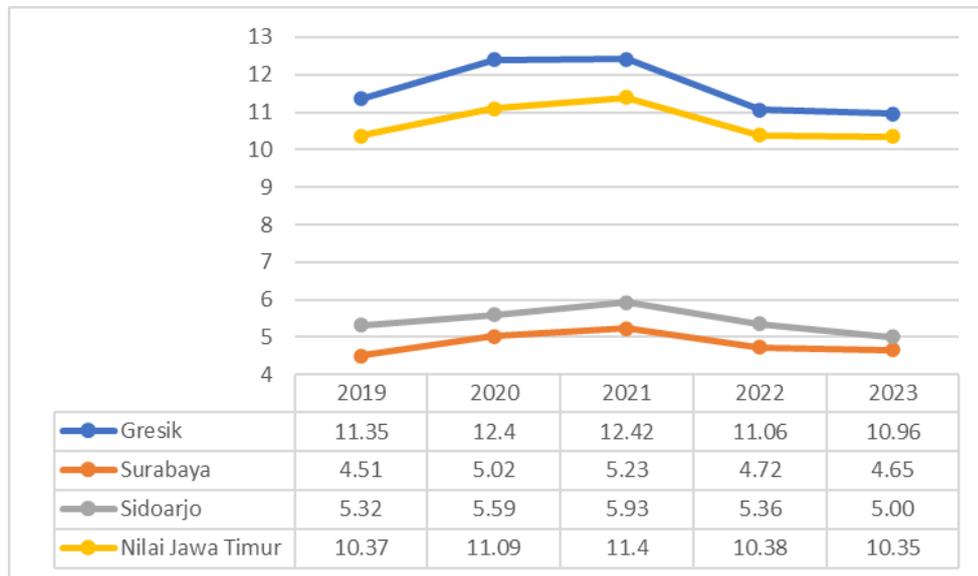
Gambar 1.2. PDRB perkapita Surabaya Raya Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar 1.2. PDRB perkapita di Surabaya Raya dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi seiring dengan berjalannya waktu, menunjukkan bahwa ada perubahan dalam alokasi dan efisiensi pendapatan masyarakat daerah. Namun, jika dilihat secara lebih detail, terdapat perbedaan PDRB perkapita yang cukup besar antara kabupaten/kota di kawasan Surabaya Raya. Misalnya, PDRB perkapita tertinggi adalah Surabaya dengan 245 juta, sedangkan PDRB perkapita terendah adalah Sidoarjo dengan 127 juta. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan manusia di kawasan Surabaya Raya.

Selain PDRB perkapita, tingkat kemiskinan di Surabaya Raya juga akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Persentase untuk penduduk yang berada pada kehidupan dengan kondisi di bawah garis kemiskinan maupun pemenuhan kebutuhan mendasar dari jumlah pendapatan dikenal sebagai istilah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan sosial dan distribusi pendapatan di suatu daerah. Ketika tingkat kemiskinan semakin menurun, kesejahteraan sosial akan meningkat dan distribusi pendapatan menjadi

lebih merata. Sebaliknya, jika tingkat kemiskinan meningkat, kesejahteraan sosial akan menurun dan ketimpangan pendapatan akan semakin besar (Afini, 2019).

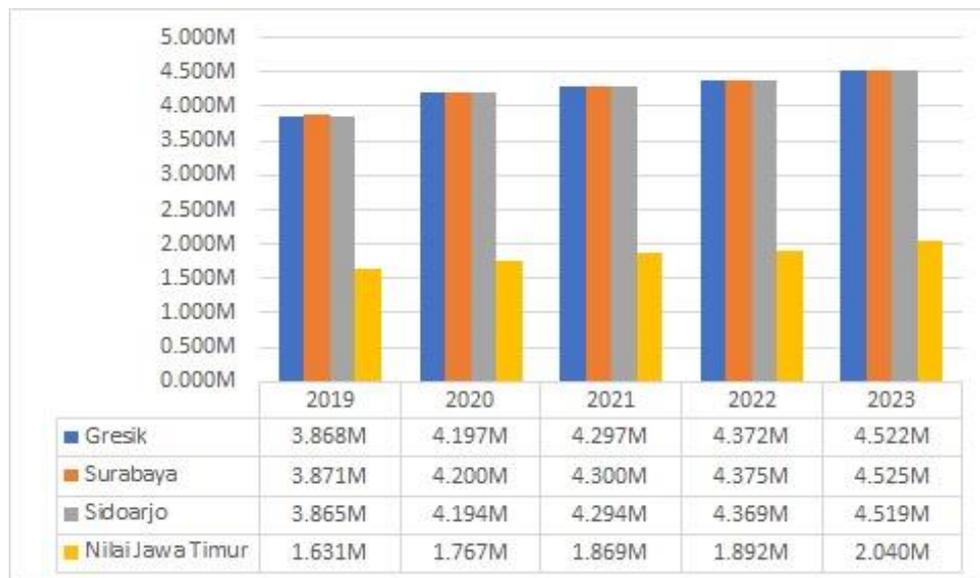


Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan Surabaya Raya Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019-2023

Gambar di atas menggambarkan fluktuasi tingkat kemiskinan seiring dengan berjalannya waktu di seluruh kabupaten dan kota. Hal tersebut, dapat dilihat pada tahun 2020 dan 2021 seluruh kabupaten dan kota di Surabaya Raya mengalami peningkatan, lalu ditahun berikutnya hingga tahun 2023 mengalami penurunan. Berarti menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin juga berkurang selama periode tersebut. Meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapatan seharusnya juga menurun. Namun, seperti halnya PDRB per kapita, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kemiskinan antara kabupaten/kota di kawasan Surabaya Raya. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Gresik memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 10,96%, sedangkan Surabaya memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu 4,62%. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kesejahteraan sosial dan distribusi pendapatan di kawasan Surabaya Raya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di kawasan Surabaya Raya adalah tingkat upah minimum. Gaji minimum merujuk pada jumlah gaji terendah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan. Upah minimum dapat mempengaruhi daya beli, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja, serta dapat menimbulkan dampak positif atau negatif terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.



Gambar 1.4 Upah Minimum Surabaya Raya Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019-2023

Berdasarkan data BPS tahun 2019 hingga 2023 upah minimum di Surabaya Raya selalu mengalami kenaikan. Karena mengalami peningkatan pada upah minimum, maka seharusnya tingkat ketimpangan pendapatan turun (Nurain & Juliannisa, 2022). Kondisi ini memberikan sebuah tanda bahwasannya masyarakat merasakan ketidakmerataan upah minimum pada tiap-tiap daerah. Namun, pada tahun 2023, terdapat variasi upah minimum antara kabupaten dan kota di kawasan Surabaya Raya, upah minimum tertinggi adalah Surabaya dengan Rp 4.525.479 sedangkan upah minimum terendah adalah Sidoarjo dengan Rp 4.518.581. Faktor-

faktor penyebab adanya perbedaan upah minimum dapat berupa perbedaan biaya hidup, produktivitas, dan kebijakan pemerintah di kawasan Surabaya Raya.

Setiap negara mempunyai permasalahan ketimpangan pendapatan, tidak terkecuali Indonesia. Dari penjelasan mengenai penyebab ketimpangan di Surabaya Raya, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor berikut memiliki peran penting dalam mengurangi ketidaksetaraan yaitu sebagai berikut: PDRB perkapita, Tingkat Kemiskinan, dan Upah Minimum. Namun pada kenyataannya, nilai PDRB perkapita, Tingkat Kemiskinan, dan Upah Minimum yang ada di Surabaya Raya masih belum mampu untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. Berpijak dari problematika diatas , dapat dilihat bahwa Kawasan Surabaya Raya memiliki masalah ketimpangan pendapatan yang cukup serius dan kompleks. Maka penulis akan lebih spesifik meneliti tentang **“Pengaruh PDRB perkapita, Tingkat Kemiskinan, dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Surabaya Raya”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan beberapa permasalahan untuk penelitian, yaitu:

1. Apakah pengaruh PDRB perkapita terhadap ketimpangan pendapatan di Surabaya Raya?
2. Apakah pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Surabaya Raya?
3. Apakah pengaruh Upah Minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Surabaya Raya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB perkapita terhadap ketimpangan pendapatan di Surabaya Raya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Surabaya Raya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Surabaya Raya.

1.4. Ruang Lingkup

Berdasarkan keterbatasan kapasitas peneliti, penelitian ini menetapkan batasan masalah untuk menjaga fokus penelitian. Batasan tersebut mencakup analisis faktor-faktor ketimpangan pendapatan di Surabaya Raya dengan fokus pada PDRB perkapita, Tingkat Kemiskinan, dan Upah Minimum.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat umum terletak pada kontribusinya sebagai sumber pengetahuan tambahan dan pengayaan ilmu pengetahuan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian terkait lainnya mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Surabaya Raya. Instansi akademik dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dengan menambah referensi ilmiah dan memperkaya koleksi perpustakaan pusat UPN "Veteran" Jawa Timur dan perpustakaan Fakultas Ekonomi. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan diskusi atau pemecahan masalah terkait. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk pengalaman

tambahan serta pengetahuan tentang penyusunan karya ilmiah yang berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga menjadi peluang untuk melatih diri dalam memecahkan masalah yang kompleks.